

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang – Undangan Agraria Indonesia, (Jakarta : Akademik Persindo, 2004).
- Algra, N. E, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta:Bina Cipta, 1983).
- Ashshofa, Burhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Bzn, Ter Haar, Asas Asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).
- Chomzah, Achmad Ali, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2004).
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan 2008).
- _____, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2002).
- Hartono, J. Andy, Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2012).
- Hadi, Sutrisno, Metodelogi Research, (Jakarta: Andi Offset, 1986).
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Kansil, S.T, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000).

Rato, Dominikus, Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, Cetakan Kedua, 2016).

Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, (Yogyakarta : Tugu Jogja, 2005).

Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1975)

Soemitro, Rony Hanitjo, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Sumardjono, Maria S.W, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI, 1982).

_____, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: RajawaliPers, 1983).

Saleh, K. Wantjik, Hak Atas Tanah, (Jakarta : Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-5, 1985).

Bayu, Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992).

Sutedi, Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta, Sinar Gafika, Cetakan Kedua, 2012).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

C. Jurnal Ilmiah

Absori dan M. Mahdi. Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, (Sukoharjo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

Wicaksono, Anggit, Turnitin Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Kabupaten Kudus, 2016).

LAMPIRAN